

APPENDIX I

50 Persen Proyek Banjir Belum Selesai

SURABAYA, KOMPAS — Sekitar 50 persen proyek Penanggulangan dan Pengendalian Banjir Kota Surabaya belum selesai, sementara hujan mulai turun. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya, Tri Siswanto, Minggu (02/11), di Surabaya.

Sebagian besar proyek tersebut baru mulai dikerjakan pada pertengahan Agustus lalu. Kendala utama adalah karena kemampuan pelaksana dalam menyelesaikan proyek tersebut di sempitnya waktu, belum menyangkut kerumitannya.

Proyek besar yang belum selesai tersebut antara lain pembuatan rumah pompa baru di Semolowaru I, Semolowaru II, Kalijudan, dan Kalidami. Lainnya adalah pemasangan pompa-pompa air baru di rumah-rumah pompa tersebut.

Daerah Semolowaru, Kalibo-

kor, Kalijudan, Kalikepiting, Kalidami merupakan langganan banjir dan sebelumnya tidak mempunyai rumah pompa. "Sekarang Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah membangunnya, diharap warga bersabar dan mau memahami," katanya. Selain proyek rumah pompa, pembenahan *box culvert* yang terletak di Jalan Moestopo juga belum sepenuhnya usai.

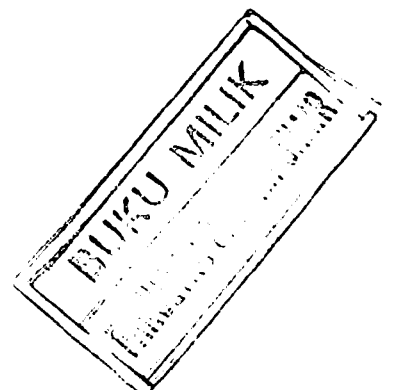
"Berdasarkan perjanjian, pelaksanaan di lapangan untuk proyek rumah pompa diberi waktu hingga pertengahan Desember mendatang. Jika pelaksanaan tidak lancar sampai batas waktu itu, akan diberi sanksi. Berupa denda atau tidak dapat mengikuti proyek di Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Surabaya dalam kurun waktu tertentu," katanya.

Adapun untuk proyek pengerukan saluran primer dan sekunder telah selesai 100 persen.

Warga diminta untuk menjaga kebersihan saluran yang telah dikeruk.

Untuk mengantisipasi genangan air, Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Surabaya juga membuka posko banjir yang terpusat di Jalan Ngagel No. 221. Warga yang mempunyai informasi dan keluhan terkait bahaya banjir di Surabaya dapat mendatangi posko itu atau menghubungi nomor telepon 5011815.

"Belakangan sudah masuk aduan dari warga Kalibokor dan Pasar Kembang. Di Kalibokor terjadi genangan karena saluran tersumbat. Permasalahan itu sudah ditangani. Sedangkan, di Pasar Kembang karena pengerjaan pompa air belum selesai," katanya. Sejauh ini, Pemkot Surabaya mempunyai 25 rumah pompa yang tersebar di daerah-daerah genangan air tinggi. (rs)



APPENDIX II

Polda Jamin Kelancaran Arus Mudik

SURABAYA, KOMPAS — Demi tercapainya kelancaran dan terciptanya suasana nyaman bagi para penumpang menjelang arus mudik tahun 2003 ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak saja berusaha memperlancar arus lalu lintas angkutan umum tetapi juga akan mengawasi praktik percaloan tiket. Bahkan kalau perlu melakukan pelacakan dan penelusuran ke beberapa agen terutama bus, kapal laut, dan kereta api.

Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jatim Inspektur Jenderal Heru Susanto pekan lalu di Surabaya mengatakan, selain melakukan upaya preventif dan preemtif, polisi juga tidak segan untuk menindak secara represif.

Upaya preventif ditempuh melalui digelarnya Operasi Ketupat 2003 menjelang hari H. Dalam operasi itu sepertiga anggota kepolisian dikerahkan secara terbuka menjaga beberapa pos-pos di sepanjang jalan terutama jalur utama antar kota maupun antar provinsi.

Adapun langkah preemtif dilakukan dengan menggalang seluruh kekuatan serta potensi yang dimiliki masyarakat seperti pendekatan terhadap beberapa tokoh untuk mencegah

terjadinya konflik.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, polisi akan menindak tegas secara represif sesuai dengan aturan yang berlaku berlandaskan hukum. Pelanggaran secara pidana diproses melalui pemeriksaan seperti biasa.

Kepala polda mengimbau seluruh jajarannya agar memantau secara rutin tempat-tempat rawan macet dan rawan kecelakaan terutama di sepanjang jalur pantai utara (pantura), seperti Tuban, Lamongan serta beberapa daerah rawan longsor antara lain Jember, Situbondo, Lumajang, dan Malang.

Kendala utama menurut kepala polda adalah pengawasan terhadap jalur pantura. Terutama pantura di kawasan timur



Heru Susanto

Jatim merupakan satu-satunya jalur antarprovinsi yang tidak memiliki jalan alternatif. Oleh karena itu, apabila terjadi longsor, banjir, atau kecelakaan sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Oleh karenanya masing-masing kepala kepolisian resor (polres) yang memiliki daerah rawan dihimbau bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mempersiapkan alat-alat berat seperti mesin pengeruk

mobil derek dan bahkan perahu karet.

Calopun diawasi

Belajar dari pengalaman mudik Lebaran beberapa tahun sebelumnya, Polda Jatim kini berupaya melakukan pengawasan terhadap calo tiket baik pesawat, kereta api, kapal maupun bus. Pasalnya ulah para calo seringkali menjadi faktor utama penghambat arus mudik.

Misalnya, banyaknya agen perjalanan terutama angkutan umum bus, kapal, dan kereta api yang mengaku kehabisan tiket pada awal bulan puasa. Seperti kasus di beberapa stasiun di Jakarta, para penumpang banyak yang kehabisan tiket pada hari pertama pembukaan penjualan.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di Jatim, Polda berniat melakukan penyidikan, dan penelusuran pada beberapa calo tiket yang memanfaatkan arus mudik tahun ini sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Polisi akan memberikan sanksi yang berat terhadap para calo apabila terbukti melakukan pelanggaran seperti memborong semua tiket untuk menaikkan harga (19)

APPENDIX III

Pelanggaran Calon Anggota DPD Segera ke Polisi

SURABAYA, KOMPAS — Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu kabupaten/kota di Jawa Timur mulai melengkapi bukti-bukti pelanggaran oleh calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD). Bukti pelanggaran itu selanjutnya disertakan dalam laporan kepada pihak kepolisian sebagai bahan penyidikan.

Anggota Panwas Pemilu Jatim Syarif Thayib mengemukakan hal itu akhir pekan lalu. "Langkah ini sebagai tindak lanjut temuan Panwaslu tentang banyaknya pelanggaran pada masa verifikasi," katanya.

Sebelumnya anggota Panwaslu Jatim Divisi Pengawasan itu mengungkapkan, sejumlah pelanggaran terjadi di Kabupaten Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Sumenep, Bojonegoro, dan Probolinggo. Pelanggaran yang ditemukan antara lain berupa penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) pendukung calon anggota DPD yang secara tidak

secara keseluruhan pelanggaran di Bojonegoro dilakukan 17 calon anggota DPD, delapan calon di Kabupaten Sumenep, enam calon di Kota Probolinggo, dan 12 calon di Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Bojonegoro, misalnya, pelanggaran

berupa dukungan palsu, karena pemilik KTP tidak mengetahui bahwa tanda tangannya digunakan sebagai bukti dukungan

Panwas Pemilu di Jawa Timur mulai melengkapi bukti-bukti pelanggaran oleh calon anggota DPD.

bagi calon anggota DPD.

Thayib menuturkan, dari laporan yang ia terima, Panwaslu Kabupaten Situbondo telah melengkapi berkas pengaduan dari 10 orang saksi dari Kecamatan Sumbermalang yang mengaku bahwa KTP mereka digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Saat ini berkas pengaduan itu sudah diserahkan kepada pihak Kepolisian Resor Situbondo, sebagai bukti awal pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pengajar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember itu menambahkan, Kabupaten dan Kota Kediri juga tengah melengkapi bukti-bukti pelanggaran yang akan segera diserahkan

kepada pihak kepolisian. Kasus yang terjadi di Kabupaten Kediri terkait dengan dugaan *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh salah seorang calon anggota DPD, sedangkan di Kota Kediri menggunakan modus penggunaan KTP sebagai bukti dukungan palsu.

"Semua langkah-langkah ini dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota, sebagai pihak yang terjun langsung dalam tahap verifikasi faktual calon anggota DPD. Panwas Pemilu Provinsi hanya menerima laporan," kata Thayib.

Cepatnya upaya menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, kata Thayib, merupakan salah satu keuntungan ditempatkannya pihak kepolisian sebagai anggota Panwaslu, sebagaimana diatur dalam pasal 124 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Selain itu, keberadaan pihak kepolisian tersebut memperlancar proses penyidikan.

Namun, langkah untuk menyingkap pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota DPD masih menjumpai kendala hingga kini. Kendala itu berupa masih belum samanya persepsi antara pihak Panwas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi. (D)

APPENDIX IV

Anti Narkoba di Pesantren Ramadhan

SURABAYA, KOMPAS — Selain mempelajari ilmu keislaman, peserta pesantren Ramadhan yang diadakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Jawa Timur, juga mendapatkan pendidikan anti narkoba. Mereka akan mendapatkan materi yang dianggap sebagai bekal remaja agar mampu menghadapi masa depannya.

Seperti dikatakan Ketua Panitia pesantren Ramadhan BKPRMI, Muhammad Arif, Minggu (2/11), di Surabaya. Da-

lam tiga hari peserta Pesantren Ramadhan mendapatkan tiga materi, yakni keislaman, keterampilan dan problematika remaja termasuk pendidikan anti narkoba.

"Kami hanya ingin membekali mereka agar siap menghadapi zamannya. Tidak cukup hanya belajar agama, tetapi juga ilmu bermasyarakat. Mereka harus tahu hal-hal yang akan membuat generasi mereka hancur, seperti narkoba dan sebagainya," ujar dia.

Melalui metode diskusi mere-

ka membahas persoalan-persoalan yang biasa dihadapi remaja. Para instruktur hanya memberikan materi mentah, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyalahgunaan narkoba.

Salah satu materi yang disampaikan instruktur adalah fatwa MUI tanggal 2 September 1996. Salah satunya, mengharamkan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Para instruktur juga memberitahukan dasar diharamkannya narkoba, seperti larangan untuk memakan sesuatu yang memabukkan dalam Al Quran Surat Al Maidah, Ayat 90.

Pendidikan anti narkoba akan diberikan pada setiap angkatan pesantren Ramadhan, yang dipusatkan di Islamic Center Surabaya. Pesantren ini diikuti oleh 336 siswa sekolah dasar yang terbagi menjadi dua angkatan, 200 siswa sekolah menengah pertama, juga terbagi menjadi dua angkatan, satu angkatan siswa sekolah menengah umum sebanyak 50 siswa dan satu angkatan untuk mahasiswa. (1.12)

APPENDIX V

Keruk Kali Mas

SURABAYA, KOMPAS
— Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengupayakan pengerukan di sepanjang Kali Mas. Pengerukan kali yang melintas di tengah kota dilakukan meskipun bukan wilayah kerja Pemkot Surabaya.

Sudah bertahun-tahun Kali Mas tidak dikeruk sehingga pendangkalan kian parah. Keadaan ini lebih diperburuk dengan banyaknya sampah, sehingga sangat mengganggu ketika akan difungsikan sebagai tempat untuk wisata perahu.

"Kepala dinas banjir sudah dikirim untuk mengajukan permasalahan tersebut ke Jasa Tirta Malang. Tampaknya sudah ada respon dan tengah dibuat proposal ke pemerintah pusat untuk pengajuan dana pengerukan Kali Mas," kata Bambang DH, Minggu (2/11) lalu.

Kali yang mengalir di tengah kota dan menampung air dari saluran sekunder yang ada di sekitar daerah alirannya. Kalau pendangkalan dikeruk, alirannya akan lebih baik dan sangat bermanfaat untuk mengurangi genangan air di sekitarnya. (11:5)

APPENDIX VI

AL Perancis Jalin Kerja Sama dengan TNI-AL

SURABAYA, KOMPAS — Angkatan Laut Perancis sedang menjajaki untuk bisa menjalin kerja sama militer dengan TNI AL. Penjajakan itu saat ini masih dalam pembicaraan dengan para otoritas kementerian Indonesia.

"Pada kedatangan yang kedua ini merupakan salah satu bentuk kerja sama yang sementara diwujudkan dalam latihan bersama," tegas Kepala Panglima Angkatan Laut (AL) Perancis Wilayah Hindia Laksamana Wilmot Roussel, Senin kemarin, di atas Kapal La Murne yang tengah bersandar di Dermaga Gapura Surya, Surabaya.

Saat ini kedua angkatan sedang membicarakan latihan antar angkatan dan pembicaraan itu telah dilakukan lebih detail. "Kegiatan ini adalah inisiatif dari pejabat angkatan laut Indonesia ketika mereka berkunjung di Perancis pada bulan Juli tahun lalu," ujar Wilmot.

Semenjak itu kedua angkatan laut mulai membangun kerjasama militer dalam bentuk latihan maupun tawaran pembelian armada laut. Untuk tujuan utama kali ini adalah mengadakan latihan bersama kedua angkatan laut.

Dalam latihan itu nantinya kedua belah pihak akan melakukan latihan laut di antaranya adalah pengisian bahan bakar di tengah laut. Terkait dengan rencana TNI AL yang akan membangun armada lautnya, pihak Perancis menyambut baik dan bahkan dia juga akan menawarkan kapal-kapal buatan Perancis kepada Indonesia.

"Namun, permintaan resmi dari Pemerintah RI belum diterima, saya sudah mendekati angkatan laut Indonesia," lanjut jenderal berbin-

tang tiga itu.

Komandan Kapal NFS La Murne Kapten Harve Bou mengatakan, latihan bersama itu rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat (7/11) mendatang. Dalam latihan ini rencananya AL Perancis akan melibatkan 35 personelnnya di atas kapal dan 15 orang lainnya di atas helikopter.

"Latihan yang akan dilangsungkan di dekat perairan Surabaya itu masih tergolong latihan kecil," jelasnya. Namun, meskipun hanya latihan kecil Perancis sangat berharap bisa meningkatkan hubungan antarkedua angkatan laut.

Kerja sama dengan ITS

Kerja sama dengan pihak Perancis ternyata tidak hanya berkaitan dengan angkatan laut saja, bahkan pada hari yang sama Duta Besar (Dubes) Perancis Ranand Vigual bersama Atase Kerja sama dan Kebudayaan Gilles Garachon juga mengunjungi kampus Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Senin siang.

Kehadirannya di ITS, selain mengunjungi para dosen lulusan Perancis, juga berjanji untuk menjembatani kerja sama di bidang keilmuan. Menurut dia kerja sama itu penting. Lulusan Perancis yang ada di ITS jumlahnya tidak kurang dari 50 orang.

Bahkan Rektor ITS Dr Muh Nuh DEA, juga adalah alumni Perancis, menilai penting kunjungan Dubes Perancis. "Sekarang ITS tengah

menjalin kerjasama dengan dua perguruan tinggi dari Perancis. Dengan Universitas La Rose untuk pengembangan Pulau Kangean dan kedua dengan ENSCI Paris untuk bidang desains industri," ka-

ta Muh Nuh.

Sementara itu Dubes Vigual juga berjanji untuk mengusulkan penambahan jatah beasiswa yang disiapkan oleh negaranya bagi para mahasiswa Indonesia. "Saat ini

terkait dengan persoalan ekonomi dan politik negara kami, jumlah penerima beasiswa sedang mengalami penurunan, tetapi kami berjanji akan kembali menambah jatah itu," tuturnya. (Lo6)

APPENDIX VII

Satu Anggota Komplotan Perampok Rp 34 Juta Tertangkap

SURABAYA, KOMPAS — Salah satu tersangka anggota komplotan perampok uang tunai Rp 34 juta. Ifo (27), warga Jalan Dukuh Kupang gang 16, Senin (3/11) ditangkap oleh Satuan Reskrim Polresta Surabaya Selatan. Dari tangan tersangka polisi menyita sebuah gobang dan ponsel merek Nokia.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Surabaya Selatan AKP Bagus DR mengatakan, tersangka merupakan tetangga korban yang hanya beda empat gang. Ketika pertama ditang-

kap tersangka tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi setelah korban memastikan mengenalinya tersangka akhirnya mengaku.

Menurut polisi Ifo mengaku pernah menjambret tas sebanyak dua kali dan berhasil menguras uang serta ponsel di dalamnya. Polisi kini masih mencari barang bukti uang yang diperkirakan disembunyikan.

Penangkapan dilakukan Minggu malam saat ia sedang *nongkrong* bersama warga se-

kitar di pos kampung. Informasi mengenai Ifo sendiri diperoleh polisi dari seorang purel di sebuah diskotek di kawasan Surabaya utara.

Menurut purel itu, "suaminya" baru saja mendapat uang Rp 30 juta dari hasil kerjanya dalam waktu yang singkat. Padahal, Ifo adalah seorang yang dikenal tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran.

Dari cerita itu polisi yang ketbetulan sedang menyamar merasa curiga. Setelah diselidiki lebih jauh, polisi memutuskan menangkap tersangka.

Alasannya, sangat logis apabila pelaku adalah tetangga korban mengingat korban tidak merasa dibuntuti tetapi tiba-tiba langsung dicegat. Kedua, pintu keluar masuk tempat korban dirampok Jalan Dukuh Kupang gang 20 hanya ada satu dan selalu dijaga oleh satpam karena termasuk kawasan perumahan.

Menurut Bagus kemungkinan pelakunya adalah apabila bukan orang dekat pasti orang

yang menguasai dengan baik seluk beluk daerah itu. Alasannya pelaku dapat dengan cepat melarikan diri tanpa bisa dicegah oleh warga kampung.

Seperti dibertakan sebelumnya, kawanan perampok yang seringkali menyatroni para nasabah bank, Jumat pekan lalu, kembali beraksi. Kali ini korban adalah Eka Sudarisman (35) Kepala Produksi UD Charnaindo sebuah industri rumah tangga yang memproduksi sepatu merk Sporty yang berpusat di Sidosermo. (15)

APPENDIX VIII

Partai Politik Dilarang Sosialisasi Pemilih Pemula

SURABAYA, KOMPAS — Sekolah boleh dijadikan tempat sosialisasi pemilu asal-tujuan utamanya adalah untuk mendidik, bukan kampanye. Namun, hendaknya pendidikan pemilih pemula di sekolah ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, sehingga harus menjadi kegiatan ekstrakurikuler.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jawa Timur Rasiyo di Surabaya, Senin (3/11). "Kalau tujuannya pendidikan boleh-boleh saja sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula. Tetapi itu jangan sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar. Apalagi jika sampai mengurangi jam belajar," tuturnya.

Pendidikan pemilih pemula di sekolah seharusnya diadakan di luar jam pelajaran. Misalnya, diberikan dalam ekstrakurikuler atau jam tambahan lainnya.

Walaupun demikian, Kepala Dinas P dan K Jatim itu tetap melarang partai politik (parpol) masuk sekolah. Artinya, jika yang mengadakan pendidikan pemilih pemula itu parpol justru tidak diperbolehkan.

"Saya setuju jika yang mengadakan itu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Seharusnya dinas pendidikan tiap-tiap kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPU daerah masing-masing, untuk memberi-

kan pendidikan pemilih pemula, seperti pelatihan teknis pemungutan suara," lanjut dia.

Rasiyo tidak setuju jika pendidikan pemilih pemula itu dijadikan sebagai mata pelajaran sendiri. Karena, pendidikan politik semacam itu, sebenarnya sudah ada dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pelajaran mengenai hak dan tanggung jawab warga negara diberikan dalam satu bab khusus, termasuk pelajaran tentang demokrasi dan demokratisasi. Keikutsertaan para pelajar SMU/SMU/K dalam pemilu merupakan aplikasi pelajaran tentang hak untuk menyampaikan pendapat.

"Sebenarnya pendidikan politik untuk pemilih pemula, tidak perlu diberikan secara eksplisit seperti itu. Pelajaran tentang politik, demokrasi, demokratisasi serta hak dan kewajiban warga negara itu sudah dari awal diberikan. Bahkan, sejak sekolah dasar," jelas dia.

Saat ini Rasiyo baru akan melakukan koordinasi dengan KPUD Jatim mengenai pendidikan untuk pemilih pemula. Walaupun setuju, dia masih meragukan pelaksanaan pendidikan pemilih pemula. "Sebenarnya, yang lebih efektif itu sosialisasi melalui RT atau RW. Kalau di sekolah takutnya parpol masuk, khawatir rusuh," ujarnya. (112)

APPENDIX IX

Sukamto Dituntut Rampingkan Pegawai

SURABAYA, KOMPAS — Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono meminta sekretaris kota yang baru, Sukamto Hadi untuk terus menuntaskan perampingan di tubuh pemerintah kota. Ini merupakan salah satu tugas berat, karena perampingan dari 23 dinas menjadi 14 dinas itu akan ada 341 jabatan struktural yang akan terhapus.

Bambang Dwi Hartono mengatakan hal ini usai pelantikan sekretaris kota (sekkota) Sukamto Hadi, Selasa (4/11), di Surabaya. Perampingan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

"Paling tidak, sekkota dapat melanjutkan yang dirintis pendahulunya. Banyak hal positif yang dirintis Pak Ali dan dapat dilanjutkan misalnya, perampingan organisasi sesuai PP Nomor 8 itu," kata Bambang DH.

Selama ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, beban untuk anggaran rutin cukup besar. Oleh karena itu, ke depannya diharapkan dapat ditekan, sehingga porsi untuk anggaran pembangunan dapat ditingkatkan.

Dalam jangka pendek, sekkota baru harus dapat menyelesaikan penataan organisasi dan sosialisasi. Jika sosialisasi tidak dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan akan berdampak buruk.

Saat ini pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tercatat sebanyak 18.527 orang. Mereka terdiri dari golongan IV sejumlah 2.515 orang, golongan III 10.562 orang, golongan II sejumlah

4.456 personel, dan golongan I sebanyak 994 orang. Mereka tersebar di bagian, badan, dinas, kantor, dan kecamatan di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Perampingan ini tentu akan memberikan implikasi terutama mereka yang mungkin sudah merasa waktunya mendapatkan posisi, tetapi dengan terbatasnya posisi terpaksa harus bergeser. Ini membutuhkan keterampilan dan cara pendekatan tersendiri," kata Bambang DH.

Banyak yang pensiun

Mengenai pilihan pensiun dini yang tengah dirintis Alisjahbana sebelum turun jabatan, wali kota mengatakan, hal itu memungkinkan. Terlebih lagi secara nasional, pemerintah menganut *zero growth* untuk pegawai.

Sekarang tidak ada pengangkatan PNS kecuali menggantikan mereka yang pensiun meninggal dan mengundurkan diri. "Memang secara umum ada tuntutan PP 8, tetapi dalam waktu dekat juga banyak yang akan pensiun," katanya.

Jumlah pegawai Pemkot Surabaya yang berusia 51-56 tahun 2003 ini sebanyak 4.189 orang atau sekitar 22,61 persen dari total PNS.

Selain itu, sekkota baru diharapkan dapat meneruskan



Bambang Dwi Hartono

program-program positif yang tengah dirintis lainnya, seperti pembentukan *holding company* dan menjalankan roda birokrasi secara transparan. Salah satu program yang sifatnya transparan adalah pelaksanaan lelang serentak.

Ketika ditanyakan tentang kemungkinan terjadinya pergantian sekkota sewaktu-waktu, Bambang mengatakan, jangan memandang pergantian sebagai suatu hal yang luar biasa. "Pergantian pejabat struktural dalam sebuah organisasi hal yang biasa," katanya.

Usai pelantikan, Sukamto Hadi tidak banyak berkomentar. Hanya saja sebelumnya, dia mengatakan, telah siap menjalankan tugasnya sebagai sekkota. Dalam sejumlah perundang-undangan telah diatur fungsi sekkota sebagai pembantu wali kota dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Termasuk menuntaskan PP 8. (urs)

APPENDIX X

Polda Jatim Tolak Saksi yang Diajukan Pak Ud

SURABAYA, KOMPAS — Tim Penyidik Tindak Pidana Ekonomi Polda Jatim menolak dua orang saksi yang diajukan oleh KH Yusuf Hasyim atau Pak Ud. Karena saksi, Ali Ahmad dan Gufron tidak memenuhi kapasitas sebagai saksi dengan alasan mereka tidak terlibat langsung dalam permasalahan pencemaran koin emas bergambar KH Hasyim Asyari.

Demikian dikatakan Kepala Satuan Tindak Pidana Ekonomi Polda Jatim AKBP Wirdhan Denny, Selasa (4/11), di Surabaya. Kedua saksi yang diajukan tidak mengetahui duduk perkara atau permasalahan yang terjadi antara keluarga Pak Ud (panggilan untuk Yusuf Hasyim) dengan pihak Gold Quest.

Gufron sehari-hari hanya bekerja sebagai sopir pribadi Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Tebu Ireng Jombang yang kebetulan saat terjadi kasus ia sedang mendampingi Pak

Ud. Sedangkan, Ali Ahmad adalah salah satu staf ponpes sedang melintas saat terjadi pembicaraan antara keluarga tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asyari dengan Martha Wilianti, salah satu anggota Gold Quest.

Penunjukan kedua saksi tersebut dinilai oleh tim penyidik terkesan asal menunjuk sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilaporkan. "Mereka berdua tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pencemaran nama baik maupun perbuatan tidak menyenangkan seperti yang dituduhkan terhadap tersangka," kata Wirdhan.

Dua orang saksi itu sudah dipanggil Senin lalu. Mereka tidak jadi diperiksa karena mengaku tidak mengetahui tentang kasus yang diperkarakan KH Yusuf Hasyim. Keterangan mereka tidak dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan.

Saat ini polisi sedang berupa-

ya mencari beberapa barang bukti yang bisa memperkuat tuduhan pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, maupun tindak pidana yang mengarah ke Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dua orang penyidik yang dikirim untuk berkonsultasi dengan Sub Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hakl Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta telah kembali. Mereka berdiskusi selama dua hari untuk membicarakan kasus yang melibatkan Pak Ud dengan Gold Quest.

Untuk sementara penyidik belum bisa memberikan keterangan atas hasil koordinasi tersebut. Mereka masih bekerja keras dan berupaya memproses kasus penerbitan koin emas bergambar KH Hasyim Asyari itu semaksimal mungkin agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. (1/3)

APPENDIX XI

Gubernur Minta Bentuk Forum Komunikasi

SURABAYA, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Imam Utomo meminta partai politik di Jatim segera membentuk forum komunikasi antar-parpol. Pembentukan forum tersebut merupakan upaya meredakan gesekan antar-parpol yang mungkin terjadi selama masa kampanye dan persiapan menjelang Pemilu tahun 2004.

Pemintaan itu disampaikan di sela-sela acara Gerakan Suksesan Pemilu 2004 di Jatim, di Graha Wicakana, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (4/11). Sejumlah bupati/wali kota, pimpinan parpol, panitia pengawas pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim hadir dalam acara tersebut.

"Partai politik (parpol) peserta pemilu dapat saling beresekan dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu, diantisipasi dan diselesaikan melalui forum ini," kata Gubernur.

Langkah fungsionaris enam parpol di Jatim yang menyepakati pembentukan komunikasi

bersama, Jumat (31/5), merupakan contoh yang tepat, sehingga dapat diikuti oleh parpol lainnya. Keenam parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Langkah enam parpol besar itu dapat diteruskan oleh yang lain," tegas Imam Utomo. Kebutuhan pembentukan forum komunikasi (forkom) merupakan upaya menekan kerusuhan, penyelesaian konflik yang mungkin timbul harus dilakukan secara internal partai lebih dulu.



Imam Utomo

Setelah itu, baru dibicarakan dalam hubungan antarpol.

Gubernur mengatakan, belajar dari pengalaman Pemilu 1999, setiap parpol harus meredakan konflik yang mungkin terjadi dengan menahan diri dan mencari titik temu. Hal ini menjadi penentu kondisi pemilu di Jatim, yang menjadi barometer

keamanan nasional.

Sosialisasi dan golput

Di Jatim terdapat sekitar 26 juta pemilih yang harus memahami pelaksanaan pemilu mendatang, sementara waktu yang tersisa tinggal 150 hari. Pemerintah menyadari beban dalam sosialisasi mendatang tidak ringan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota berjanji akan membantu KPU di setiap daerah.

Anggota KPU Jatim, Aribowo mengatakan, sosialisasi dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap I pada bulan September-Desember 2003, tahap II pada Januari-April 2004, dan tahap III pada Mei-Oktober 2004. Masing-masing tahap memiliki sasaran dan beban sosialisasi tersendiri.

Sementara itu, Aribowo juga mengungkapkan, munculnya golongan putih (golput) dalam pemilu merupakan salah satu penanda tercapainya demokra-

si di masyarakat. Kemudiannya muncul golput dipengaruhi oleh banyak variabel, kelompok golput umumnya adalah warga negara yang lebih kritis dalam bersikap.

"Di negara dunia pertama dan demokratis, banyaknya golput menandakan bahwa sistem pemilu yang digunakan semakin demokratis," tambahnya. Dengan demikian, dalam sosialisasi pemilu yakin dapat menegaskan kepada pihak yang apatis terhadap pemilu bahwa Pemilu 2004 menggunakan sistem yang demokratis.

"Jadi kami yakin tidak akan banyak golput di Jatim ini. Sepanjang tradisi pemilu, golput yang mencapai 20 persen dari jumlah pemilih saja sudah dikatakan banyak," kata Aribowo.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Persidihan Komite Independen Pemantau Pemilu Jatim Andreas Parlede menegaskan, pencapaian golput sebagai peralihan tercapainya demokrasi harus diwaspadai. Pasalnya,

keputusan pemilih menjadi golput didasari oleh dua hal, yaitu secara teknis dan ideologis.

"Kalau secara teknis, tidak terlalu berpengaruh, karena mereka benar-benar tidak tahu atau bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih. Namun, jika berdasarkan ideologis dan mencapai 20 persen, maka menjadi satu hal yang harus diawatirkan," kata Parlede.

Pasalnya, secara teori, kondisi jumlah pemilih yang terlibat dalam pemilu mencapai 50 persen sudah dapat menandai legitimasi pemilu tersebut. Hal ini terjadi di Indonesia, sehingga pemilu di Indonesia memiliki legitimasi yang sulit terbantahkan.

Oleh karena itu, kondisi golput sebanyak 20 persen dari jumlah pemilih harus diwaspadai, karena bukan tidak mungkin jumlahnya akan menggelandang dan bertambah banyak dalam pemilu mendatang. Terlebih lagi, jika keputusan untuk menjadi golput itu disebabkan oleh putokan ideologis, itu

APPENDIX XII

Komisaris Polisi Terjaring Operasi Sabuk

SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Timur khususnya jajaran Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya, Rabu (5/11), mulai menggelar operasi sabuk pengaman yang difokuskan pada 10 titik di jalur utama atau jalan-jalan protokol. Sekitar 500 pengendara mobil terjaring dalam operasi itu, termasuk seorang berpangkat Komisaris yang berdinis di Polda Jatim turut ditilang.

Dalam operasi yang digelar di Taman Bungkul, Surabaya polisi yang menghentikan mobil secara acak dan dengan tidak sengaja menyetop mobil mewah yang ditumpanginya Kompol SW.

Saat diperiksa bukan hanya SW dan sopirnya tidak mengenakan sabuk pengaman, bahkan SIM yang dimiliki sopirnya sudah habis masa berlakunya. Untungnya sang Komisaris itu menyadari dan mau mengakui kesalahannya.

Operasi sabuk pengaman

yang digelar di tujuh titik lokasi seperti Taman Bungkul, Siola, dan Keputran, dibagi dalam dua sesi pertama mulai pukul 08.00 hingga 14.00. Setelah beristirahat, diteruskan kembali sekitar pukul 16.00 hingga 18.00. Evaluasi pelaksanaan di lapangan dilakukan setiap hari usai menggelar operasi.

Untuk tahap awal penerapan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 23 Ayat 1 dan 2 mengenai pemakaian sabuk pengaman pada pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya itu baru dilakukan di wilayah Kota Surabaya.

Setiap satu pelanggaran, biasanya denda yang dikenakan sekitar Rp 36.000. Padahal dalam UU jelas dikatakan bahwa ancaman hukuman bagi pelanggar sabuk pengaman maksimal kurungan satu bulan atau denda Rp 1 juta.

Koordinasi ditangani langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya AKBP Royké Lumowa diban-

tu empat jajarannya yakni Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur, Polresta Surabaya Utara, dan Koordinator Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurut Kompol Heri Wahono, Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya yang terjun langsung memimpin operasi tidak semua masyarakat mau menerima dengan besar hati. Sebagian besar mereka marah-marrah sambil terus mengomel ketika ditilang.

Meski ada sebagian mereka mencoba merayu petugas dengan menyodorkan beberapa lembar uang agar tidak ditilang. Soyoto (44), warga Kapas Sari yang sore itu ditilang di Taman Bungkul mencoba menyuap polisi meski akhirnya gagal.

Heri mengemukakan, adanya pro dan kontra dari masyarakat mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran sabuk pengaman merupakan hal yang wajar. (LIS)

APPENDIX XIII

Dampak Sosial Penggusuran Sangat Besar

SURABAYA, KOMPAS — Rencana penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Dampak sosial terbesar yang berpengaruh pada masyarakat adalah kondisi telantar yang dialami oleh warga, seketika setelah digusur dari tempat tinggal mereka.

Hal itu disampaikan oleh Imam Rochani, Staf Ahli Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH) di Surabaya, Rabu (5/11). "Oleh karena itu, masalah sosial ini harus dikaji sebaik-baiknya. Kalau benar-benar jadi dipertakakan, maka dimasukkannya dapat diminimalisir," tandas Imam.

Imam terlibat dalam tim teknis rancangan peraturan daerah (perda) tentang sempadan sungai sebagai anggota subtim

kajian sosial. Saat ini kajian sosial belum dilakukan, karena masih menunggu hasil kajian yang direncanakan selesai pada 10 November mendatang.

Kajian sosial dimaksudkan sebagai upaya memperkecil pengaruh penggusuran atau pemindahan sempadan sungai terhadap kondisi sosial masyarakat. Sejauh ini cita-cita yang diharapkan adalah tidak adanya gangguan sosial bagi warga

Dampak sosial muncul setelah warga kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran, kehilangan harta benda, dan menjadi tunawisma.

stren kali yang selama ini selalu merasa terpinggirkan oleh pengusaha di stren kali.

"Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah tidak melakukan tindakan yang membuat warga merasa di-frontalkan, sementara pengusaha dibiarkan," tandas Imam.

Selama ini terkesan hanya warga yang memiliki stigma sebagai pelaku pencemaran melalui limbah rumah tangga dan menyalakan banjir. Padahal di sepanjang Kali Surabaya, se-

jumlah pabrik membuang limbah ke sungai, sehingga merusak sungai.

"Sayangnya pemerintah sepertinya memberi kelonggaran pada pengusaha. Hal yang sama tidak dipemah oleh masyarakat. Oleh karena itu, tim teknis ini menampung aspirasi masyarakat," tandas Imam.

Menjadi golondangan

Dampak sosial muncul setelah warga kehilangan tempat

tinggal akibat penggusuran, kehilangan harta benda, dan menjadi tunawisma. Bahkan, warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan menderita masalah sosial bertumpanyak.

Dari hasil kajian Imam sebagai aktivis di bidang lingkungan hidup, dampak penggusuran bukan hanya mengganggu aspek sosial, melainkan berbagai aspek kehidupan lain. Tak kurang ekonomi dan budaya adalah dua bidang yang paling gampang terimbas proses penggusuran.

"Hal-hal lain yang juga terganggu dalam proses penggusuran adalah kesehatan dan keagamaan, yang akan berkurang kondisi dan intensitasnya," katanya.

Oleh karena itu, Imam berharap agar kajian pola pikir sumber daya air akan memberikan

hasil yang mendukung upaya berikutnya, yaitu sosial, aspek yang sangat penting. Selain itu, sempadan sungai serta pertukaran lahan. Jika semua itu memperhatikan hasil terkecil, kepentingan berbagai pihak harus diakomodir dengan baik.

Sebelumnya Ketua Tim Teknis Chusnul Arifien Damikari menuturkan, tim teknis akan mengadakan beberapa pertemuan hingga merekomendasikan hasil kajian. Hasil kajian itu selanjutnya dikirimkan kepada Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah melalui Gubernur.

"Diharapkan, pada tanggal 17 November nanti sudah ada hasil kajian tim teknis," kata Chusnul. Pihak Penyusun Jahu tidak memberikan arahan tertentu kepada tim teknis, sebagai pekerjaan mereka.

APPENDIX XIV

Gubernur Diminta Batalkan Perda PKL

SURABAYA, KOMPAS — Para pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL Surabaya (PPKLS) meminta Gubernur Jatim membatalkan perda PKL yang disahkan beberapa waktu lalu oleh DPRD Surabaya. Perda itu mereka nilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan perundangan lainnya.

Selain mengirimkan surat pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Rabu kemarin, mereka juga berencana akan mengadakan unjuk rasa. PKL dari 15 titik di Surabaya yang jumlahnya sekitar 1.500 anggotanya didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya berencana kembali berunjukrasa ke DPRD Surabaya, Kamis (6/11).

Seperti dikatakan M Syaiful Arif dari Divisi Miskin Kota LBH Surabaya, kemarin, perda

PKL melanggar kepentingan umum sebab tidak mendahulukan kesejahteraan umum. "Pemerintah seharusnya dibentuk untuk melaksanakan amanah rakyatnya. Semua aspiratif warganya menjadi syarat moral dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk para PKL. Seharusnya hak-hak warga tidak dirampas," katanya.

Di dalam Pasal 2 (2) Perda tersebut, misalnya, disebutkan, wali kota berhak menetapkan, meniadakan, dan menghapus lokasi PKL dan pedagang tidak diberikan ganti rugi. Jika PKL melanggar, akan didenda Rp 5 juta atau penjara enam bulan.

Perda tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 dan Pasal 11. Pasal 9 perundangan itu menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Pasal 11 mengatakan, setiap orang berhak atas peme-

nuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang layak.

"Terlebih lagi, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) mengamankan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan, Pasal 28 (a) menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya," katanya.

Dengan alasan-alasan tersebut PKL memohon kepada gubernur agar menyatakan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 itu dicabut. PKL juga menuntut agar dibentuk tim perumus penyusunan perda PKL Surabaya dengan melibatkan seluruh pihak terkait masalah PKL Surabaya, seperti pemerintah kota (pemkot), dewan perwakilan rakyat daerah, dan PKL.

Ketua Paguyuban PKL Surabaya, Choirul Anam juga menyerukan kepada para PKL Surabaya untuk memperjuangkan hak-haknya. (ms)

APPENDIX XV

Polisi Akhirnya Tangkap Lima Perampok Truk

SURABAYA, KOMPAS — Setelah beritanya nyaris terlupakan akhirnya Polwiltabes Surabaya berhasil mengungkapkan perampokan truk dengan membunuh sopirnya. Sebelum berhasil menangkap truk trailer berukuran 40 feet, polisi berhasil menangkap lima dari enam orang yang melakukan perampokan.

"Motivasi mereka adalah untuk mendapatkan duit," tegas Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya Ajun Komisaris Besar R Sigit TH, Kamis (6/11), di Surabaya. Setelah hampir satu bulan, polisi berhasil menangkap jaringan perampok itu yang ternyata masih ada hubungan satu sama lainnya.

Lima orang pelaku yang ditangkap itu adalah Abdul Jalil (45) warga Batu, Mohammad Rosid Efendi warga Jalan Bayan - Malang, Imam Marzuki (27) warga Bangkalan-Madura, Mohammad Siman (52) warga Labang Bangkalan, dan Hatiman warga Bangkalan. "Mereka ini masih satu kampung atau berasal dari satu keluarga," ujar Sigit.

Peristiwa perampokan ini sudah terjadi pada Rabu (10/9) di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya, ketika sopir truk menghentikan truknya di depan wartel untuk menghubungi kantornya.

Komplotan perampok itu membunuh sopir trailer bernama Don Bosco Keo seorang warga Flores yang bekerja di PT Parani Arta Mandiri.

Setelah kernet truk, Dominikus TS, kembali dari wartel sudah tidak menemukan truknya lagi. Truk warna silver itu sudah raib dan sopir Don Bosco Keo ditemukan dalam keadaan tewas dibuang di kawasan Krian Sidoarjo keesokan harinya.

Otak perampokan

Dari kelima kawanan yang berhasil ditangkap itu kemudian diketahui, Rosid se-

bagai otak perampokan. Dia sebenarnya adalah seorang penerima jasa pengamanan 'swasta' antarkota. Seluruh pelaku ditangkap di tempat yang berbeda di tempat tinggal masing-masing.

"Sebenarnya uda satu lagi yang berhasil kami tangkap pada hari Senin (3/11) bernama Toni. Namun, dia bukan pelaku perampokan, tetapi hanya membantu pelaku melakukan kejahatan," tegas Iptu Sirdi, ketua tim penangkapan dari Satuan Idik I Polwiltabes Surabaya.

Dari proses penyelidikan itu kemudian polisi berhasil menemukan tempat truk itu disembunyikan. Truk berisi kendaraan Honda Karisma, empat Honda GL Max dan dua Honda Tiger yang belum dirakit. "Kini semua sepeda itu sudah dijual ke penadah-penadah," jelas penyidik.

Penyidik mengungkapkan, truk ditemukan polisi di gudang milik seorang bernama Toni yang bekerja sebagai penjual plastik dan karton bekas. "Gudang milik Toni besar, bisa menampung 10 truk yang sejenis," jelas penyidik.

Kini, polisi mengamankan pelaku dan barang buktinya berupa truk trailer ukuran 40 feet di markas Polwiltabes Surabaya. Sementara itu, polisi masih merahasiakan satu anggota komplotan yang belum tertangkap.

Para pelaku perampokan ini dapat dikenakan Pasal 365 dan 338 KUHP karena telah melakukan perampokan dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. (06)

APPENDIX XVI

Bus Cadangan Tak Akan Masuk Terminal

SURABAYA, KOMPAS — Keinginan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Bungurasih agar bus-bus cadangan yang dipersiapkan untuk angkutan lebaran tahun 2003 tidak akan masuk ke dalam terminal sebelum mereka benar-benar diperlukan sepertinya tercapai.

Kepala DLLAJR Provinsi Jatim Binsar Tua Siregar mengatakan bus-bus cadangan itu akan ditempatkan di garasi masing-masing PO. Bus-bus itu tidak akan diizinkan masuk ke terminal tanpa persetujuan dari UPTD.

Kepala UPTD Budi Utomo mengemukakan, lebaran tahun lalu terjadi aksi demonstrasi dari para sopir bus cadangan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan transportasi di terminal. Demonstrasi itu disebabkan masuknya bus-bus cadangan ke dalam terminal.

Setelah menunggu lama karena tidak ada lonjakan penumpang, para awak bus menjadi emosi. Ditambah pendeknya waktu antrean bus menjadi sekitar 15 menit karena banyaknya jumlah armada bus yang mengantre mengakibatkan mereka tidak memiliki waktu banyak mencari penumpang.

Berdasar pengalaman tersebut, UPTD berinisiatif mengajukan usul kepada DLLAJR Provinsi Jatim agar bus-bus cadangan sebanyak 450 yang disiapkan tahun 2003 tidak diperbolehkan masuk terminal.

Bus cadangan tetap disiagakan agar apabila diperlukan langsung bisa dipakai. Tetapi mereka tidak harus ditempatkan di terminal melainkan disiapkan di garasi masing-masing. "Baru ketika diperlukan mereka akan dihubungi secara langsung," katanya.

Menurut Budi, pengertian bus cadangan sebenarnya adalah angkutan berupa armada bus yang fungsinya menggantikan bus asli yang kebetulan tidak bisa diberangkatkan karena mengalami kerusakan mesin atau ketidaksiapan secara fisik.

Selain itu bus cadangan juga diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Bus-bus cadangan ini tidak akan diizinkan memasuki terminal karena dapat memperkeruh suasana.

Selain mempersempit ruang gerak mobilitas bus dan penumpang, keberadaan bus ekstra di lokasi terminal juga bisa memicu terjadinya bentrok antar-awak bus seperti kejadian pada lebaran tahun lalu. Untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar awak bus, DLLAJR juga menjalin kerja sama dengan kepolisian. (14/1/15)

APPENDIX XVII

YLKP Minta Calo dan Armada Bus Ditertibkan

SURABAYA, KOMPAS — Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur meminta instansi-instansi terkait seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dinas perhubungan, Pemerintah Kota Surabaya, serta Pemerintah Sidoarjo agar bekerjasama melakukan penertiban baik armada bus maupun calo yang beroperasi di Terminal Bungurasih.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKP) Jatim Drs M Said Utomo, Jumat (7/11) di Surabaya, mengomentari persiapan jelang Lebaran yang dilakukan DLLAJR Jatim. "Penambahan armada perlu, tetapi harus juga dibarengi dengan upaya penertiban," katanya.

Upaya penertiban itu dimaksudkan untuk memberi kenyamanan serta jaminan keselamatan terhadap penumpang yang ingin bepergian menggunakan bus.

Penertiban meliputi pengaturan armada bus yang beroperasi di terminal baik secara reguler maupun sebagai cadangan. Terutama bus cadangan, harus memenuhi standar kelaikan jalan dengan kondisi fisik yang bagus.

Bus selain disertai surat keterangan uji KIR harus juga diperiksa kelengkapannya baik administrasi maupun keamanan. Bus harus memiliki sistem pengamanan seperti pintu darurat, matil pemecah kaca, dan tabung pemadam kebakaran.

Tertibkan calo

Said juga meminta agar instansi terkait itu menertibkan para calo yang beroperasi di terminal bahkan sampai masuk peron. Alasannya keberadaan para calo ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan pada hari-hari biasa jumlah calo yang berseliweran, lebih banyak dibanding jumlah penumpang.

Keberadaan mereka selain mengganggu ketertiban, juga kenyamanan para penumpang. Perilaku para calo juga telah merampas hak untuk memilih bus yang akan dinaiki.

Mereka sering kali bertindak kasar memaksa para penumpang naik bus yang jelek karena tergiur oleh besarnya komisi yang dijanjikan awak bus. Para calo tidak pernah

mempertimbangkan bahwa penumpang yang naik bus jelek selain merasa tidak nyaman juga terancam keselamatannya.

Parahnya lagi, para calo ini memberikan tarif yang lebih tinggi dari harga sebenarnya. Mereka tidak segan memaksa agen-agen bus untuk mengatakan tiketnya telah habis agar penumpang beralih kepadanya.

Menurut Said, selama ini hak penumpang untuk mendapatkan pelayanan yang baik, kenyamanan dan keamanan menggunakan fasilitas umum di Terminal Bungurasih belum terpenuhi. Padahal mereka masuk ke terminal tidak secara gratis.

Penumpang masuk ke terminal seperti masuk dalam hutan belantara. Selain tidak ada informasi tentang tarif, tempatnya kotor, mereka juga diseret-seret dan bahkan di tipu oleh calo, kadang juga dibentak-bentak. Dan pada akhirnya mendapatkan bus yang jelek, tidak layak jalan.

Pemerintah diharapkan tidak sekadar berlomba-lomba menaikkan pendapatan dari terminal, tetapi juga memikirkan memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. "Tugas menaikkan pendapatan itu urusan dinas pendapatan. Fungsi terminal adalah memberikan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah," paparnya. (L3)

Selama ini hak penumpang untuk mendapatkan pelayanan yang baik, kenyamanan dan keamanan menggunakan fasilitas umum di Terminal Bungurasih belum terpenuhi.

APPENDIX XVIII

Kepergok, Pencuri Bacok Tiga Orang

SURABAYA, KOMPAS — Empat dari enam anggota komplotan pelaku pencurian disertai penganiayaan, Jumat (7/11), berhasil di langkap anggota Reskrim Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Wonocolo. Mereka telah melukai tiga korban yang masih bersaudara karena kepergok saat menjalankan aksinya.

Ketiganya menderita luka yang serius di bagian dada dan perut sebelah kiri akibat terkena tusukan pisau lipat dan harus dilarikan ke RSAL Dr Ramelan Surabaya. Korban Purwoko (65) dan anaknya Elke Irene, hingga kemarin masih berada di ruang ICU dengan kondisi sangat kritis. Sementara itu, anak lainnya Adrian (23), telah dipindahkan ke ruang perawatan intensif di Paviliun H-1.

Kepala Polsekta Wonocolo AKP Soemiran mengatakan, mereka satu keluarga yang tinggal di Jalan Bendul Merisi Selatan Gang IV, Surabaya.

Pelaku adalah Sungsang (19) asal Ketintang Baru, Gatot Susanto (18) warga Jetis, Didik Suharto (20) warga Wonokromo dan Nuri Roesman (16) asal Jemur Wonosari. Dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Sungsang berhasil ditangkap polisi saat ditemukan bersembunyi di atas plafon rumah. Kaki kanannya ditembak karena mencoba melarikan diri. Didik dan Nuri ditangkap di Jalan Bendul Merisi. Gatot dituduh saat bersembunyi di rumahnya.

Kepergok

Sekitar pukul 01.00, Jumat dini hari enam orang pelaku naik becak ke swalayan Indomaret yang terletak di jalan kembar Bendul Merisi. Mereka berniat mencuri barang dengan cara menaiki atap.

Sayangnya sebelum berhasil masuk, mereka keburu ketahuan oleh warga yang kebetulan bangun untuk mem-

persiapkan sahur. Warga langsung bergerombol dan meneriaki Sungsang yang tengah berada di atas atap.

Merasa panik tertangkap basah, Sungsang lantas mencoba lari dengan meloncat di atap rumah warga. Ia baru menemukan celah persembunyiannya ketika tiba di rumah Purwoko.

Sungsang masuk melalui jendela nako yang terletak di salah satu kamar di lantai dua rumah Purwoko. Elke, yang tidur di kamar sebelahnya terbangun setelah mendengar keributan di luar dan pecahnya kaca di ruangan sebelah.

Elke lari ke lantai bawah menuju kamar ayahnya Purwoko. Ibunya, Titik Sri Untarti (60), tidak percaya dengan cerita Elke. Ia lantas menuju ke kamar mandi. Saat itulah, Sungsang masuk ke kamar Purwoko.

Pelaku langsung menghujamkan pisau lipat ke dada dan perut Purwoko hingga dua kali. Ia juga menusuk Elke tepat di dada kiri ketika secara sengaja korban masuk ke kamar ayahnya.

Adrian, putra bungsu Purwoko terbangun ketika mendengar keributan. Adrian yang saat itu tidur di kamar bersebelahan dengan kamar ayahnya, berniat keluar mencari tahu sumber keributan.

Saat membuka pintu kamar, dilihatnya ayah dan kakaknya sudah berlumuran darah. Adrian lantas mengejar korban yang lari ke ruang tamu berusaha membuka pintu depan. Melihat ada orang menuju ke arahnya, pelaku langsung menghujamkan pisau ke perut korban hingga robek.

Ibu dan Nela, kakak Adrian yang lain, berhasil selamat dari Sungsang setelah bersembunyi di dalam kamar mandi. Keduanya langsung membawa korban ke RSAL dengan dibantu oleh beberapa warga. (1/11)

APPENDIX XIX

Date	Pattern (N=3)	No.	Title	Sample of Analysis
3 November 2003	3	1.	Operasi Obat Belum Maksimal	√
		2.	Kepedulian Mitra Usaha	
		3.	50 Persen Proyek Banjir Belum Selesai	
		4.	Reklame di Cagar Budaya Perlu Ditata	
		5.	Pemkot Tak Segan Cabut Izin Tempat Hiburan	
	2N	6.	Polda Jamin Kelancaran Arus Mudik	√
		7.	Kurikulum 1994 Membuat Siswa Stres	
		8.	Sudah 33 Daerah Terverifikasi	
	3N	9.	Anti Narkoba di Pesantren Ramadhan	√
		10.	Bongkar	
		11.	FKB Larang Anggotanya Rekreasi ke Eropa	
	4N	12.	Pelanggaran Calon Anggota DPD Segera ke Polisi	√
		13.	Jelang Lebaran Uji KIR Diperketat	
4 November 2003	5N	14.	Angkutan Laut Lebaran	√
		15.	AL Perancis Jalin Kerjasama dengan TNI-AL	
		16.	BPOM Gerebek 14 Toko Seks di Surabaya	
	6N	17.	Staf Bakesbang Penuhi Panggilan Kejari	√
		18.	Keruk Kalimas	
		19.	Pemerintah Kota Peringatkan 14 Tempat Hiburan	
		20.	Pemilu 2004 Sepi Pemantau	
	7N	21.	Partai Politik Dilarang Sosialisasi Pemilih Pemula	√
		22.	Calon Anggota DPD	
		23.	Dinas Sosial Operasi Gepeng	

	8N	24.	1 Anggota Komplotan Perampok Rp 34 Juta Tertangkap	√
5 November 2003	9N	25.	Merasa Ditipu Oknum Pemkot	√
		26.	Meski Tak Mampu, Masih Menjaring Nasabah	
		27.	Polda Jatim Tolak Saksi yang Diajukan Pak Ud	
	10N	28.	Relokasi Pohon Bisa Digeser	√
		29.	Mungkin Korban Salah Culik	
		30.	Sukanto Dituntut Rampingkan Pegawai	
11N	31.	Pendidikan Berbasis Produksi	√	
	32.	Larangan Parpol Masuk Sekolah Tak Rasional		
6 November 2003	12N	33.	Gubernur Minta Bentuk Forum Komunikasi	√
		34.	Kelompok Basuki Kian Terancam	
		35.	Warga Tagih Janji Suramadu	
	13N	36.	Dampak Sosial Penggusuran Sangat Besar	√
		37.	Bukan Hanya Soal SPP Gratis	
		38.	Pertemuan Buruh dan Pengusaha Gagal	
14N	39.	Komisaris Polisi Terjaring Operasi Sabuk	√	
	40.	Haruskah 10 November ?		
	41.	PT Vonis Basuki Setahun		
7 November 2003	15N	42.	Gubernur Diminta Batalkan Perda PKL	√
		43.	Kasus Alisjahbana Tidak Kuat	
		44.	Buruh Diimbau Masuk Kerja	
	16N	45.	Bus Cadangan Tak Akan Masuk Terminal	√
		46.	Awas, longsor	
		47.	Paling Tidak 4 Profesor Gabung PDI-P	
16N	48.	Polisi Akhirnya Tangkap 5 Perampok Truk	√	
	49.	PKB Sediakan 120 Lembar Formulir Caleg		

8 November 2003	17N	50.	19 Buruh Dipecat Sepihak	√
		51.	YLPK Minta Calo dan Armada Bus Ditertibkan	
		52.	Penggusuran bukan Satu-satunya Jalan	
	18N	53.	Tak Terkecuali Hotel Berbintang	√
		54.	Kepergok, Pencuri Bacok 3 Orang	
		55.	Kejari Periksa Pimpinan Proyek	
56.		Satgas Partai Amankan Pemilu		

